

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana agar kelak ketika masa hukumnya telah selesai, para narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan ketrampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana dan untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meninjau peraturaan-peraturan yang berlaku dan meninjau praktik pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang. Hasil dari penelitian yaitu: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang melakukan pola pembinaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan terhadap narapidana dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Tahap Awal,Tahap Lanjutan I & II,Tahap Akhir. Pada pembinaan tahap awal narapidana melakukan pengenalan terhadap lingkungan, pada pembinaan tahap lanjutan I narapidana sudah berhak mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pada tahap lanjutan II dilakukan asimilasi, dan pembinaan pada tahap akhir dilakukan pembinaan intergrasi. Kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor narapidana, faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat. Banyaknya kendala yang dihadapi menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan hal tersebut juga diakui oleh petugas pemasyarakatan. Untuk mengatasi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pihak lapas berusaha memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, memberdayakan narapidana yang memiliki ketrampilan khusus dan menjalin kerja sama dengan pihak ke tiga, baik dari instansi penegak hukum maupun dengan pihak swasta, hal tersebut dilakukan demi menjaga kelancaran pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana. Selain pihak lapas, kesadaran yang muncul dari diri narapidana sendiri juga berpengaruh untuk mensukseskan program pembinaan yang telah diberikan kepadanya, sehingga narapidana dapat berubah kearah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pembinaan Narapiadana, Mencegah Pengulangan Tindak Pidana

ABSTRACT

Correctional Institutions are places for fostering inmates so that in the future when the legal period has been completed, the prisoners can return to the community with certain skills that have been trained in Prison. The purpose of this study was to find out the implementation of prisoner guidance to prevent repetition of crimes and to find out the obstacles and solutions in implementing prisoner guidance to prevent repetition of crimes in Kedungpane Class 1A Correctional Institution Semarang. The method of the sociological juridical approach, namely reviewing applicable regulations and reviewing the practice of implementing prisoner guidance to prevent repetition of crimes in Kedungpane Class 1A Correctional Institution Semarang. The results of the research are: Implementation of Guidance for Prisoners to prevent repetition of crimes in Kedungpane Class 1A Correctional Institution in Semarang to conduct a pattern of guidance that is in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning correctional services and also based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Citizens Penitentiary Guidance. The guidance program for prisoners is carried out through 3 (three) stages, namely: Early Stage, Advanced Stage I & II, Final Stage. In fostering the initial stage of the prisoner's introduction to the environment, in the advanced stages of development I inmates have the right to get personality development and independence development, in the second stage assimilation is carried out, and guidance at the final stage is carried out in integrated guidance. Constraints faced by correctional officers in carrying out prisoner guidance to prevent repetition of crime are influenced by several factors, namely: prisoner factors, law factors, law enforcement factors, infrastructure facilities, community factors. The number of obstacles faced is the cause of the lack of effective implementation of guidance for prisoners and this is also recognized by correctional officers. To overcome various obstacles in the implementation of guidance for prison prisoners trying to maximize existing facilities, empower prisoners who have special skills and establish cooperation with third parties, both from law enforcement agencies and the private sector, this is done in order to maintain fluency the implementation of a coaching program for prisoners. In addition to the prison authorities, the awareness that arises from the prisoners themselves also influences the success of the coaching program that has been given to them, so that prisoners can change to a better direction and will not repeat the criminal act again.

Keywords: Implementation of Guidance for Prisoners, Prevent Repetition of Criminal Acts